

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

Tahun Sidang : 2019-2020  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke- : 6  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perum Bulog  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Kamis, 9 April 2020  
Waktu : 10.15 s.d. 13.00 WIB  
Tempat : -  
Acara : Membahas mengenai Penyerapan Cadangan Beras Pemerintah dan Ketersediaan Pangan dalam rangka Menghadapi Pandemi COVID-19 serta Persiapan Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2020.  
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F.PDIP)  
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo  
Hadir : A. 39 Anggota dari 55 Anggota Komisi IV DPR RI

**B. Hadir Pemerintah:**

1. Drs. Budi Waseso (Direktur Utama Perum Bulog);
2. Gatot Trihargo (Wakil Direktur Utama Perum Bulog);
3. Tri Wahyudi Saleh (Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog);
4. Bachtiar Utomo (Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Perum Bulog);
5. Wibisono Poespitohadi (Direktur Pengadaan Perum Bulog);
6. Bagya Mulyanto (Direktur SDM dan Umum Perum Bulog);
7. Triyana (Direktur Keuangan Perum Bulog);
8. Mansur (Direktur Komersial Perum Bulog);

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Direktur Utama Perum Bulog (**secara virtual**) membahas mengenai Penyerapan Cadangan Beras Pemerintah dan Ketersediaan Pangan dalam rangka Menghadapi Pandemi COVID-19, serta Persiapan Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2020, dibuka pukul 10.15 WIB oleh Ketua Rapat Sudin, S.E. dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

1. Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah untuk memberikan penugasan kepada Perum Bulog guna menyerap gabah dan beras petani lebih besar dengan memperhatikan kesejahteraan petani dalam rangka memenuhi kebutuhan persediaan Cadangan Beras Pemerintah.
2. Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah untuk memberikan penugasan penyaluran bantuan pangan kepada Perum Bulog dalam rangka stabilisasi harga dan ketersediaan pangan di tengah Bencana Nasional COVID-19. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendukung Perum Bulog untuk melakukan kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) pada sasaran tertentu, baik dalam program Kartu Sembako maupun pekerja informal yang selisih harga dan marginnya ditagihkan kepada Pemerintah.
3. Komisi IV DPR RI mendukung Pemerintah untuk mewajibkan setiap pemilik gula swasta untuk menyalurkan 20% produksi gula ke Perum Bulog dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga gula nasional. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendorong Perum Bulog untuk tetap menjual komoditas gula sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
4. Komisi IV DPR RI mendukung Pemerintah untuk memberikan penugasan importasi komoditas tertentu yang jumlahnya terbatas kepada Perum Bulog, dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga.
5. Komisi IV DPR RI mendukung Perum Bulog untuk memaksimalkan kinerjanya dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan di tingkat konsumen dan produsen sesuai dengan penugasan jenis pangan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.
6. Komisi IV DPR RI mendukung Pemerintah, Perum Bulog, dan BUMN lainnya untuk melakukan koordinasi dalam memanfaatkan realokasi anggaran dan/atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bencana Nasional COVID-19 dengan memanfaatkan persediaan beras Perum Bulog.

7. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk mengganti importasi daging kerbau yang mengalami penundaan dikarenakan pandemi COVID-19 dengan melakukan penyerapan daging ayam lokal.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB.

Direktur Utama  
Perum Bulog,

Ttd.

**Budi Waseso**

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Sudin, S.E.**

A-151